

SEKTOR EKSPOR PERIKANAN INDONESIA MENGHADAPI REGULASI INTERNASIONAL MENGENAI STANDARISASI MUTU PRODUK EKSPOR

Oleh: Rizki Hari Wibowo
Magister Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: tulisajarizki@yahoo.co.id

Abstrak

Rezim perdagangan internasional yang dimotori oleh *World Trade Organization* (WTO) dibawah naungan PBB telah menjelma sebagai kekuatan kapitalisme yang membungkus ekonomi global dalam sebuah sistem yang pada dasarnya dilahirkan demi membuka peluang-peluang keuntungan ekonomi bagi pemilik modal dan negara-negara industri maju. Norma internasional memiliki posisi tawar yang mudah diterima oleh banyak negara untuk menerima, meratifikasi, dan mengaplikasikan produk kebijakan WTO pada aktifitas ekonomi domestiknya. Standardisasi tidak ubahnya seperti sebuah ukuran norma internasional yang wajib dicapai oleh seluruh negara. Keterbatasan sumber daya modal dan tertinggalnya penggunaan teknologi industri di negara-negara berkembang dan miskin membuat pencapaian standar pasar internasional sulit dipenuhi. Selanjutnya muncul tantangan yang hanya bisa dijawab dengan ketersediaan modal.

Yang sedang terjadi sekarang ini ketersediaan modal dijawab dengan munculnya perusahaan multinasional (MNCs). Bermula dengan menggandeng perusahaan lokal, secara berangsur justru membunuh perusahaan modal dalam negeri. Faktanya jelas bahwa sekarang ini angka ekspor indonesia didominasi oleh kontribusi dari perusahaan besar bermodal asing. Penolakan ekspor produk perikanan indonesia disejumlah pasar hanya bisa dijawab oleh campur tangan aktor asing. Hal ini merupakan gambaran nyata ketergantungan ekspor indonesia kepada pelaku bisnis asing.

Kata kunci: Standardisasi, Ketergantungan, Modal, Teknologi Industri

Abstract

International trade regime that was driven by *World Trade Organization* (WTO) under the auspices of the United Nations has emerged as forces of capitalism that wraps the global economy into a system that is basically born to open the opportunities for economic benefit to the capital owners and the advanced industrial countries. The international norm has to be a good concept that must act by many countries by accepting, ratifying and practising the product WTO policies on domestic economic activity. Standardization is not different with international norms that must be achieved by all countries. Limitations of financial resources and lagging of technology industries in developing and the underdevelopment countries makes difficult to meet international market standards. This a challenge that can only be answered by the availability of finance.

Now, the availability of capital to be answered with the masive expansion of multinational corporations (MNCs). Started by cooperating with local companies, gradually it kills domestic companies. The Fact, the current export figures Indonesia is dominated by the contribution many foreign capital companies. Rejection of Indonesian fishery products exported in several markets can only be answered by the intervention of foreign actors. This is a real dependence situation on Indonesian exports to foreign actor or investors.

Keywords: Standardization, dependency, Financial, Industrial Technology

A. Pendahuluan

Dalam perdagangan internasional khususnya kajian mengenai ekspor-impor tidak dapat lepas dari perjanjian-perjanjian atau regulasi yang dilahirkan oleh organisasi internasional. Regulasi-regulasi yang disepakati dalam *World Trade Organization* (WTO) bersifat mengikat bagi negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia. Rezim perdagangan internasional telah melegalkan WTO menjadi satu-satunya lembaga dunia yang memiliki kredibilitas dalam mengatur perekonomian internasional. Berada di bawah organisasi PBB, kebijakan yang dihasilkan WTO

seringkali hanya menguntungkan Negara-negara maju dan justru menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah regulasi mengenai standardisasi mutu produk ekspor, termasuk didalamnya mutu manajemen perusahaan. Tujuan dari munculnya regulasi standardisasi ini pada dasarnya diarahkan sebagai unsur penunjang pembangunan. Standardisasi mempunyai peranan penting dalam usaha mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dalam kegiatan pembangunan. Standardisasi berperan pula dalam menunjang kemampuan produksi khususnya peningkatan perdagangan internasional, serta pengembangan industri dan perlindungan konsumen. Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional yang turut meratifikasi kerangka WTO ini, dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu Indonesia tanpa tawar menawar, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan kerangka atau regulasi-regulasi dikeluarkan oleh WTO.¹

Disisi lain, kebijakan standardisasi internasional justru menjadi hambatan dalam perdagangan internasional, khususnya bagi Negara berkembang dimana industri didominasi jumlahnya oleh industri kreatif yang dikelola secara swadaya. Standardisasi masuk dalam kategori hambatan non tarif (*nontariff barrier*) yang oleh kalangan kritikus ekonomi internasional dianggap sebagai upaya negara untuk melindungi kepentingan ekonomi domestiknya terhadap produk-produk impor yang masuk ke negaranya. Kajian mengenai hambatan non tarif mengenai kebijakan standardisasi sampai detik ini masih sangat sering dikaji karena pengaruhnya yang berdampak pada penurunan angka ekspor bagi beberapa negara anggota WTO, khususnya negara berkembang, yang kesulitan memenuhi tingginya standardisasi pasar internasional. Kesimpulannya adalah standardisasi internasional memang diperlukan dalam perdagangan internasional selama tingkat standar yang disepakati memungkinkan untuk dapat dipenuhi oleh negara-negara anggota WTO lainnya. Sebaliknya jika standar yang diberlakukan terlalu tinggi maka justru akan menghambat kegiatan perdagangan internasional suatu negara.

¹ Sutiarnoto MS, 2001, *Tantangan dan Peluang Investasi Asing*, Jurnal Hukum, Vol 6 No. 3, Agustus, hal. 271

Pemerintah Indonesia dengan status keanggotaannya dalam WTO harus ikut mengaplikasikan kebijakan WTO dengan meratifikasi kebijakan dan menerapkan dalam sistem ekonomi domestik. Pemerintah Indonesia harus segera memfasilitasi kebijakan standardisasi dengan peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang mencakup Metrologi Teknik (Standar Nasional Satuan Ukuran dan Kalibrasi), Standar, Pengujian, dan Mutu untuk mengatur standardisasi mutu produk ekspor. Konsep tersebut mengacu pada konsep internasional tentang *Measurement, Standard, Testing and Quality Management (MSTQ) Infrastructure*. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi terbentuknya sistem standar nasional yang akan mendukung peningkatan mutu produk ekspor dari Indonesia.

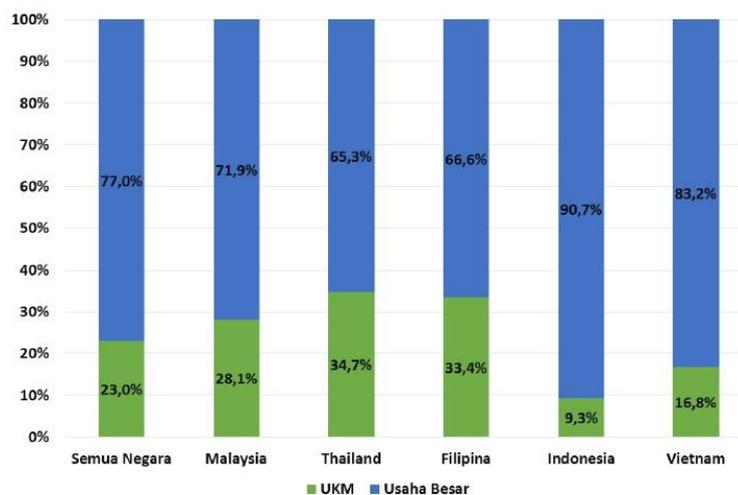
Sumber daya alam Indonesia dari sektor kelautan sangat potensial dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Bukan hanya mampu menutup kebutuhan domestik namun juga mampu memenuhi permintaan pasar internasional. Peluang pengembangan usaha perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat tinggi. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai USD 82 miliar per tahun.² Realisasi potensi perikanan ini mendapat tantangan standardisasi ekspor yang tidak bisa dianggap sebelah mata dari pasar internasional. Terdapat fakta dimana produk Indonesia banyak mendapat penolakan dari pasar internasional. Penolakan produk ekspor Indonesia oleh Negara pengimpor salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan hasil pengujian di dalam negeri dan hasil pengujian yang dilakukan oleh negara pengimpor, serta ketidakmampuan pengujian di dalam negeri karena lemahnya infrastruktur pengukuran nasional yang mengatur tentang metrologi, pengujian, dan pengontrolan kualitas produk. Lemahnya infrastruktur pengukuran nasional dapat menjadi sasaran politik dagang negara tujuan ekspor untuk merendahkan nilai produk atau bahkan menolak produk ekspor Indonesia.

Penolakan produk perikanan Indonesia ke pasar potensial internasional haruslah mendapat perhatian lebih intensif dari pemerintah Indonesia sebab jika hal ini tidak

²<http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>, diunduh pada 28 Desember 2016

ditangani dalam jangka pendek kedepan akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekspor. Indikasi lain yang menjadi permasalahan terkait standar pasar adalah kontribusi ekspor oleh perusahaan domestik atau perusahaan berjenis modal dalam negeri (non modal asing) yang masih rendah. Dengan menggunakan data *World Bank Enterprise Survey* yang mencakup 5.900 perusahaan pada lima negara ASEAN, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Vietnam, didapati kontribusi ekspor UKM Indonesia adalah yang terendah dibandingkan dengan empat negara ASEAN lain. Kontribusi ekspor UKM Indonesia hanya 9,3 %, kontras dengan UKM Thailand, Filipina, dan Malaysia yang mampu berkontribusi diatas 28,1 % terhadap total ekspor. Bahkan kontribusi UKM Indonesia terhadap total ekspor masih tertinggal dibawah UKM Vietnam dengan kontribusi sebesar 16,8 %.³

Gambar 1. Kontribusi Ekspor UKM dan Perusahaan Besar



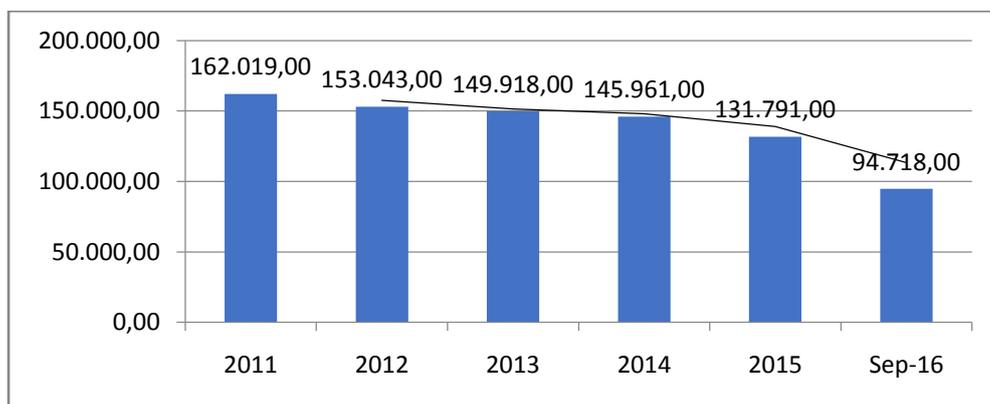
Sumber: Wignaraja, 2012

Menarik untuk menganalisis langkah pemerintah Indonesia yang meratifikasi kebijakan standardisasi mutu produk ekspor namun pada saat sekarang ini justru disebut sebagai salah satu alasan penyebab melambatnya ekspor perikanan Indonesia ke pasar-pasar potensial yang didominasi oleh negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dengan potensi sumber daya perikanan yang sedemikian luas seharusnya Indonesia mampu menjadi raja dalam ekspor komoditi ikan ke seluruh

³Wignaraja, G., Jinjark, Y, 2015, *Why do SMEs not borrow more from banks? Evidence from the People's Republic of China and Southeast Asia*. ADBI Working Paper 509.

dunia. Namun sampai saat ini proses ke arah tersebut berjalan lambat seiring dengan dikeluarkannya perjanjian-perjanjian perdagangan yang justru menjadi penghambat pertumbuhan ekspor komoditi sektor perikanan Indonesia.

Gambar 2. Penurunan Ekspor Non Migas Indonesia 2011-September 2016



Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2016

Kajian ini diharapkan mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan ekspor perikanan Indonesia dengan menunjukkan titik permasalahan yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah jika komoditi perikanan Indonesia ingin tetap bertahan ditengah diberlakukannya regulasi standardisasi mutu produk ekspor oleh pasar internasional.

B. KERANGKA TEORITIK

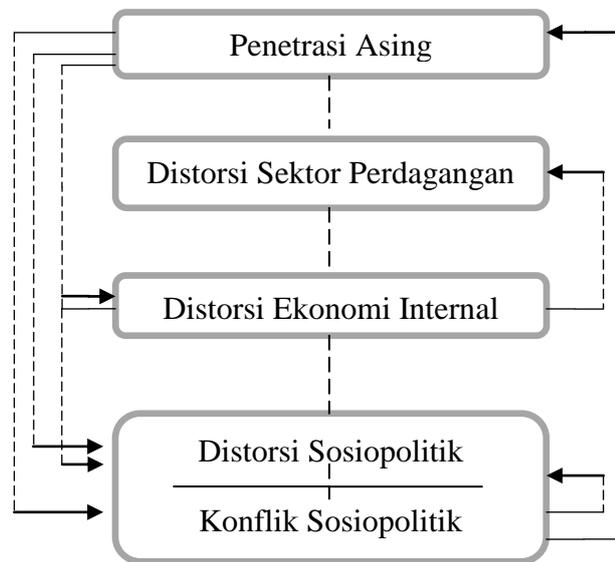
Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Teori ketergantungan yang juga termasuk teori struktural yang memihak kepada kemiskinan di dunia ketiga dan mengkhhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, maksudnya yakni negara yang kuat melakukan eksploitatif terhadap yang lemah. Maka dari adanya sifat yang merugikan negara yang lemah surplus ekonomi dari dunia ketiga yang pada awalnya merupakan negara pra kapitalis atau negara yang memproduksi pertanian beralih ke negara industri yang maju.⁴ Pendekatan

⁴ Blomstrom dan Hettne. 1984, *Development Theory in Transition, The Dependency Debate and Beyond: Third World Response*, London : Routledge, hal 17

Dependency pada dasarnya hendak menjelaskan persoalan kemunduran negara-negara bekas jajahan dunia ketiga dengan melihatnya dalam konteks global.⁵

Gambar 3. Model Sederhana Teori Ketergantungan



Sumber: Mohtar Mas' oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, hal. 204

Kondisi ketergantungan adalah merupakan keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan ketergantungan terjadi bila ekonomi beberapa negara (yang dominan tentu saja) bisa berekspansi dan berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negara-negara tertentu (yang tergantung) mengalami perubahan tetapi hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif.⁶

Teori ketergantungan inilah yang kemudian menginspirasi masuknya perusahaan multinasional dari Negara maju yang melakukan ekspansi bisnis dan perluasan pasar dinegara-negara berkembang diseluruh dunia. Dalam kajian standardisasi, ketergantungan Negara berkembang muncul pada upaya mengimplementasikan kebijakan standar internasional dilevel domestik. Negara-

⁵ Mohtar Mas' oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta; LP3ES;1990, hal. 204

⁶ Theotonio Dos Santos, 1970, *The Sctructure of Dependence*, American Economic Review, Vol 60 (2), h. 231

negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi mengalami kesulitan untuk memenuhi standar internasional yang diminta, hal ini membuka kesempatan besar bagi investor asing dan MNCs untuk terlibat dalam aktifitas produksi dan ekspor di Negara berkembang.

Salah satu contoh aplikatifnya adalah keterbatasan infratraktur membuat perusahaan domestik di Indonesia kesulitan memenuhi jumlah permintaan dengan kualitas produk yang konsisten baik dan harus dipenuhi dalam waktu cepat hanya dapat dilakukan dengan penggunaan mesin berteknologi tinggi yang harganya sangat tinggi. Hal ini membuka peluang bagi masuknya investor dan MNCs untuk menyediakan fasilitas teknologi tersebut dan pada akhirnya kelompok investor ini akan memperoleh keuntungan dari aktifitas ekspor yang dilakukan oleh Negara produsen.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Dalam penelitian ini akan menggunakan dua sumber data untuk menyempurnakan analisis yakni sumber data primer dan data sekunder. Data Sekunder akan lebih menitikberatkan pada telaah pustaka *atau library research* yang akan di peroleh dari berbagai buku, dokumen, jurnal, koran, majalah, website dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian data primer akan dilakukan observasi lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada aktor-aktor yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif, langkah-langkah analisis yang sering digunakan untuk memahami komponen-komponen data adalah reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.⁷

⁷Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press

D. PEMBAHASAN

Kajian ekonomi dalam hubungan internasional khususnya mengenai perdagangan global mulai terlihat masif pasca perang dunia II. Dekolonisasi pada tahun 1940-1950an melahirkan negara-negara merdeka baru yang kemudian dilanjutkan dengan agenda bersama untuk melakukan pembangunan dengan salah satu tujuannya menciptakan kesejahteraan ekonomi disemua negara. Dari situasi ini, ketergantungan Negara baru terhadap negara maju pada hakikatnya sudah mulai terlihat. Diawali dengan *tagline* “pembangunan (*development*)” negara industri maju menunjukkan kepeduliannya terhadap negara bekas kolonialisme untuk membangun perekonomiannya. Lahirnya PBB yang kemudian menjadi Organisasi Internasional paling berpengaruh di dunia telah mengatur banyak sektor kehidupan, seperti sektor ekonomi, keamanan, budaya, pendidikan, hak asasi manusia, dan sektor-sektor yang lainnya. Dalam hal ekonomi dan kaitannya dengan perdagangan internasional dibentuk badan khusus dibawah naungan PBB dengan label World Trade Organization (WTO). Sejak kelahirannya WTO telah banyak mengeluarkan regulasi yang mengatur perdagangan internasional.

Munculnya standar pasar internasional yang kemudian dibekukan dalam sebuah regulasi internasional yang dikeluarkan oleh WTO membawa konsekuensi bagi negara anggotanya untuk meratifikasi, membentuk aturan hukum, dan kemudian mengimplementasikannya dalam sistem perekonomian domestik. Sektor ekspor dan impor jelas paling terdampak atas kebijakan standardisasi pasar internasional. Keanggotaan negara-negara berkembang dalam WTO seringkali menjadi korban atas kebijakan yang dikeluarkan WTO. Mulai dari kebijakan pasar bebas yang kemudian membuat negara-negara berkembang mau tidak mau harus membuka diri sebagai bagian dari pasar global, harus mampu meningkatkan daya saing, sampai pada harus dihadapkan pada kebijakan hambatan non tarif yang menjadi penghambat sektor perdagangan internasional dari negara-negara berkembang oleh negara-negara maju. Yang menarik adalah bagaimana sebuah kebijakan WTO seperti memiliki kemampuan memaksa yang membuat setiap negara anggota untuk meratifikasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan WTO, apapun bentuk kebijakannya, baik yang pro maupun kontra dengan kalkulasi kemampuan negara terhadap kebijakan tersebut.

Standar dalam pasar internasional juga ditentukan oleh pengaruh negara-negara industri maju yang kemudian disepakati melalui WTO dan didorong untuk diimplementasikan kepada seluruh negara anggota. Ukuran atau standar yang disepakati mengacu pada standard di negara industri maju sehingga muncul kesenjangan (*Gaps*) yang dibegitu jelas dirasakan oleh negara kecil dan berkembang. Dalam hal produk ekspor muncul kebijakan sertifikasi produk sebagai prosedur keabsahan sebuah produk dari negara eksportir untuk beredar atau dipasarkan di negara pengimpor. Beberapa kriteria yang diminta dalam sertifikasi cukup kompleks dan menuntut penggunaan teknologi (mesin) dalam proses produksinya. Sekali lagi, kasus yang muncul kemudian adalah penolakan produk ekspor dari negara berkembang ke dalam pasar negara-negara maju sebagai konsekuensi bagi produsen yang tidak mampu memenuhi standar pasar dimana standard pasar tersebut justru dibentuk dalam kesepakatan diantara konsumen itu sendiri.

1. Standardisasi Mutu Produk Ekspor sebagai Produk Kebijakan Rezim Perdagangan Internasional

Rezim perdagangan internasional mengeluarkan kebijakan standardisasi mutu produk ekspor sebagai sebuah ukuran (nilai) yang wajib dipenuhi oleh aktor-aktor perdagangan internasional. Dengan pendekatan konstruktivisme kita dapat melihat bahwa kebijakan ini dikeluarkan untuk membangun standar norma atau standar nilai yang disepakati secara global yang harus diikuti oleh seluruh negara di dunia demi menaikkan tingkat kemakmuran dunia secara merata. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah Indonesia terkesan bergegas meratifikasi kebijakan standardisasi mutu produk ekspor kedalam sistem perekonomian khususnya perdagangan, tanpa melakukan pertimbangan matang dengan melihat sejauh mana kemampuan pelaku ekspor di Indonesia. Dalam realisasi kebijakan ekonominya WTO dan negara-negara industri maju memang tidak “lepas tangan” namun ikut memberikan solusi-solusi ekonomi yang dapat membantu negara kecil dan berkembang menuju pada standar yang diinginkan. Solusi berupa modal asing menjadi cara yang paling relevan dilakukan. Masalahnya justru muncul pada pengelola modal asing, dalam hal ini pemerintah, di negara-negara kecil dan

berkembang yang tidak mampu mengelola dan mendistribusikan modal secara tepat guna dan tepat sasaran.

Dalam menganalisis standarisasi sebagai penetrasi asing peneliti membaginya dalam dua pendekatan, yaitu *Pertama*, dalam pendekatan *mekanisme pasar*, standarisasi dilihat sebagai permintaan pasar. Modernisasi telah membawa konsumen di negara maju memiliki standar yang tinggi terhadap sebuah produk. Kemampuan daya beli yang tinggi juga telah mengarahkan konsumen kepada memilih produk dengan kualitas yang lebih terjamin sekalipun dengan harga yang lebih tinggi. Permintaan undang di Eropa dan Amerika Serikat misalnya, memberi ketentuan impor yang kompleks dan prosedur yang panjang sebelum akhirnya produk dapat diterima dan beredar dipasar Uni Eropa maupun AS. Kedua pasar ini adalah dua pasar undang paling potensial bagi ekspor undang dari Indonesia. Dengan demikian penetrasi asing dalam hal standarisasi pada pendekatan mekanisme pasar terjadi dengan sendirinya sebagai hasil dari upaya tawar-menawar antara importir sebagai pembeli dan eksportir sebagai penjual. Penetrasi dilakukan oleh pasar dan bukan ditentukan oleh aktor pemerintah dan pengusaha.

Kedua, dengan pendekatan rezim perdagangan internasional dimana terdapat fakta bahwa kebijakan standarisasi ini sudah muncul cukup lama dan menjadi agenda yang banyak dibicarakan dalam WTO sejak dekade 1960an, dalam upaya pengurangan hambatan non tarif. Melihat pada periode waktu tersebut akan sangat tidak konservatif jika standarisasi muncul akibat mekanisme permintaan atau pasar, melainkan standarisasi merupakan bentuk proteksi oleh Negara-negara industri maju untuk melakukan kontrol terhadap kemungkinan ekspansi perdagangan internasional yang dilakukan oleh Negara semi periperal dan periperal yang bergerak lebih masif akibat dari dorongan pembangunan yang gencar mereka lakukan. Oleh sebab itu melalui badan ekonomi dunia, WTO, disepakati kebijakan-kebijakan non tarif dimana satu diantaranya menggunakan kebijakan standarisasi sebagai penghambat ekspor. Dari banyak kajian dan substansi yang ada dalam kebijakan hambatan non tarif adalah jelas sebagai alat yang legal bagi negara untuk melakukan mekanisme-mekanisme proteksi pasar demi melindungi kepentingan ekonomi domestiknya. Dari penjelasan ini dalam disimpulkan bahwa standarisasi

dilihat dengan pendekatan rezim internasional adalah penetrasi asing yang dilakukan oleh negara-negara maju melalui WTO.

Standardisasi produk ekspor sebagai produk mekanisme pasar maka sejalan dengan konsep pasar bebas, dimana campur tangan negara ditekan seminimal mungkin dan menyerahkan kesepakatan-kesepakatan perdagangan pada pelaku usaha dan konsumen. Berbeda dengan standardisasi yang dilihat dengan menggunakan pendekatan rezim perdagangan internasional dimana mengindikasikan adanya intervensi aktor negara industri maju dalam pasar, dan bahkan dilakukan secara kolektif melalui organisasi perdagangan dunia (WTO).

Seolah menjawab keraguan negara eksportir yang melihat kebijakan hambatan non tarif sebagai mekanisme proteksi negara kemudian negara maju dalam WTO mengkaitkannya dengan isu-isu tata kelola dalam perdagangan internasional (*Good Governance*), seperti dapat dilihat dalam unsur-unsur investasi dan manajemen perusahaan. Standardisasi disebut sebagai ukuran atau ketentuan yang wajib dipenuhi eksportir dalam hal memenuhi tanggung jawab terhadap konsumen dan keterbukaan informasi atas produk yang dipasarkan secara internasional.

Terlepas dari hal tersebut diatas, Thomas G Weiis dalam buku "*Global Governance*" memaparkan munculnya kesenjangan tata kelola global (*Global Governance Gap*) yang muncul akibat adanya standar internasional. Ketentuan standar pasar internasional menuntut negara eksportir harus mampu bertahan dan berusaha meningkatkan daya saing agar dapat mengurangi kesenjangan antara standar domestik dengan standar internasional dan mengambil keuntungan dalam perdagangan internasional. Ini adalah sebuah tantangan bagi negara berkembang utama dalam menghasilkan kebijakan ekonomi yang mengarah pada standar pasar internasional dengan melibatkan semua pelaku industri baik industri kecil dan menengah maupun industri besar.

Yang menarik dalam rezim internasional, baik pada sektor politik maupun ekonomi, terdapat pola atau model yang selalu dilakukan oleh negara industri maju yang umumnya adalah negara-negara dengan ideologi ekonomi yang kapitalis, untuk mendorong kebijakan yang diinginkan. Model yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan bagi pembangunan, bisa berupa pencairan utang luar negeri

maupun bantuan modal pembangunan lainnya, dengan persyaratan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang diinginkan oleh negara kapitalis.

Ketersediaan bantuan modal berupa utang banyak ditawarkan kepada negara berkembang yang sedang berupaya membangun perekonomian. Ironisnya slogan “pembangunan (*development*)” justru didorong untuk memaksa negara berkembang bersedia meminjam modal kepada lembaga donor internasional di bawah PBB. Belum lagi ditambah dengan perlombaan produk-produk “demokrasi” yang seolah menjanjikan keuntungan yang menggiurkan kepada negara yang dianggap demokratis. Dorongan pengarusutamaan gender misalnya, didorong kepada negara berkembang dengan cara pencairan utang luar negeri yang menggiurkan. Munculnya Kementerian Pemberdayaan Peranan Wanita pada rezim orde baru tepatnya pertengahan dekade tahun 1970an dan kemudian diikuti dengan peningkatan utang luar negeri Indonesia pada periode waktu yang sama mengindikasikan adanya pola yang dimaksud diatas.

Pada periode setelah diratifikasinya kebijakan standardisasi mutu produk ekspor oleh pemerintah Indonesia terjadi peningkatan utang luar negeri Indonesia. Berdasarkan data kementerian Keuangan RI, Tahun 2001 utang luar negeri Indonesia sebesar US\$ 58,791 juta dollar meningkat ditahun 2002 menjadi US\$ 63,763 juta dollar, dan meningkat menjadi US\$ 68,914 juta dollar pada tahun 2003. Hal ini adalah fakta yang sangat beralasan untuk bisa kita hubungkan dengan telah diratifikasi dan diundang-undangkannya kebijakan standardisasi mutu ekspor oleh pemerintah Indonesia dengan PP Nomor 102 tahun 2000. Mengingat standardisasi ekspor dinilai sangat penting peranannya dan dinilai dapat mempengaruhi volume ekspor maka pemerintah Indonesia dengan cukup lantang menyuarakan pelaksanaan standar nasional untuk mendukung standar ekspor.

Kebijakan pembangunan di negara berkembang banyak dicampuri agar mengikuti kepentingan aktor asing, kaitannya dengan kebijakan utang luar negeri. Ada dua skema yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan di negara berkembang, yakni melalui pemberian utang dan yang lain melalui pendanaan hibah lewat NGOs internasional yang bekerjasama dengan NGOs nasional dan regional. Isu dan program pembangunan negara berkembang

disesuaikan dengan konseptualisasi mereka.⁸ Oleh sebab itu pikiran neoliberalis yang menguasai perekonomian dunia dan yang tergabung dalam perusahaan atau korporasi sejagad (*MNCs*) mendanai dan sekaligus menentukan konsep pembangunan. Edelman, 2006, dalam *The Anthropology of Development and Globalization; From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism*, menyebutkan bahwa pembangunan itu adalah terminologi yang tidak stabil.

*Is it an Ideal, an imagined future toward which institutions and individual strive? Or is it destructive myth, an insidious, failed chapter in the history of Western Modernity (Escobar 1995) Conventionally "development" may connote improvement in well being, living standards, and opportunities. It may also refer to historical process of commodification, industrialization, modernization, or globalization. It can be a legitimizing strategy for states, and its ambiguity lends itself to discourse of citizen entitlement as well as a state control.*⁹

Penetrasi asing lainnya akibat dari globalisasi modal adalah munculnya perusahaan Multinasional (*MNCs*) yang pada akhirnya dapat mematikan perusahaan domestik. Negara wajib membuka arus investasi dan *MNCs*, namun gagal membangun industri berbasis kerakyatan. Maka yang terjadi adalah penguasaan terhadap faktor-faktor produksi yang penting bagi negara oleh pemodal besar dan investor asing di Indonesia. Akibatnya dalam jangka panjang, terjadi konsentrasi kepemilikan modal asing dalam sektor ekonomi nasional. Misalnya proyek utang luar negeri untuk mendorong liberalisasi sektor energi, menyebabkan 85% cadangan Migas nasional dikuasai oleh asing. Kenyataan ini telah membentuk struktur ekonomi nasional yang timpang dan melahirkan ketidakadilan ekonomi di tengah rakyat.

Khusus kebijakan standarisasi mutu produk ekspor, analisis ini semakin menguat jika dilihat dari sistem standar nasional Indonesia yang masih rendah akibat dari kondisi infrastruktur produksi di Indonesia yang belum mendukung standar pasar internasional, terutama pasar di negara maju. Pemerintah Indonesia yang

⁸Edwards, Michael, 2007, *Civil Society*: Polity Press in association with Blackwell Publishing Ltd, Malden, MA 02148, USA

⁹Edelman, Marc and Angelique Hangerud.: 2006, *The Anthropology of Development and Globalization; From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism*. Blackwell Publishing, Malden MA USA, Victoria, Australia

mengetahui kondisi perekonomian dalam negeri tentu tidak begitu saja menyetujui kebijakan WTO mengenai standardisasi. Pemerintah tentu sudah mengkalkulasi resiko yang akan muncul dikemudian hari. Oleh sebab itu tentu ada upaya-upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui WTO atau kepada negara-negara maju untuk mengurangi resiko. Hasilnya adalah adanya bantuan finansial yang nilainya cukup besar mengingat kesenjangan standar produk Indonesia yang cukup jauh dari standar negara maju. Besarnya angka tersebut berbanding lurus dengan besarnya biaya negosiasi yang diperoleh pemerintah, baik pada level eksekutif maupun legislatif.

Dalam hal standardisasi mutu produk ekspor adanya perusahaan MNCs dengan kepemilikan modal asing justru menjadi ancaman bagi perusahaan domestik. Asumsi pemerintah yang memposisikan MNCs sebagai mitra pendorong pada akhirnya akan berbalik menjadi predator bagi perusahaan kecil dan menengah. Adalah kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang lebih dan lebih yang menjadi alasan perusahaan-perusahaan dalam persaingan usaha. Dengan kata lain, perusahaan sebagai produsen akan menganggap perusahaan produsen lain sebagai lawan yang dapat merebut pasar sehingga keberadaannya harus ditekan. Hal inilah yang harus dipahami benar oleh pemerintah Indonesia dalam upayanya melindungi kesejahteraan bangsa.

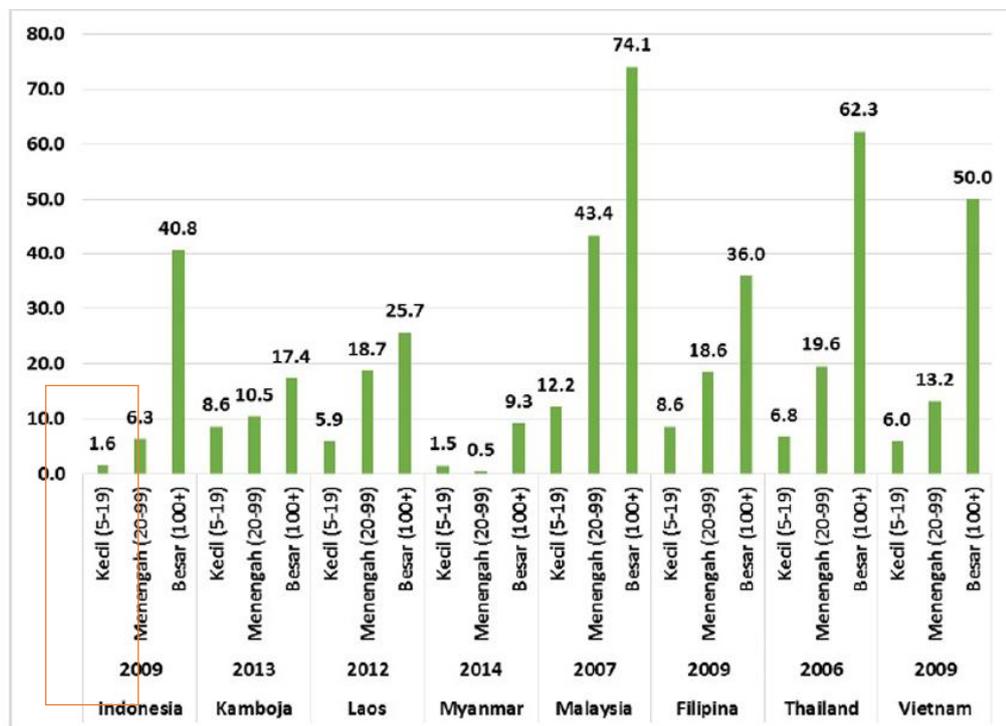
2. Dampak Standardisasi Mutu Ekspor pada Sektor Perikanan Indonesia

Sejak tahun 1994 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian pembentukan WTO melalui diterbitkannya UU No 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Dengan demikian, Indonesia telah sepakat untuk mengikuti aturan-aturan WTO dalam kebijakan perdagangan luar negerinya. Indonesia sebagai anggota WTO tidak dapat menghindarkan diri dari konsekuensi keanggotaannya di WTO untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam WTO. Standardisasi kemudian diratifikasi dan diwadahi dalam aturan perundangan-undangan Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 102 Tahun 2000 dan beberapa produk hukum lainnya yang mengatur standardisasi di Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah

implementasi kebijakan yang akan mendukung peningkatan keuntungan negara dari dalam aktifitas perdagangan internasional.

Sebelum membahas distorsi domestik akibat adanya standardisasi mutu, disajikan data kemampuan industri kecil dan menengah Indonesia yang masih tertinggal dibanding dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara lainnya, hal ini sebenarnya yang menjadikan pertumbuhan ekspor Indonesia berjalan lambat.

Gambar 4. Distribusi Ekspor berdasarkan jenis usaha di Negara ASEAN



Catatan: Tahun data untuk tiap negara bervariasi. Indonesia, Filipina, dan Vietnam menggunakan data tahun 2009; Malaysia tahun 2007; Laos tahun 2012, Kamboja tahun 2013; Myanmar tahun 2014.

Sumber: *World Bank Enterprises Survey*

Menurut data World Bank Enterprises Survey, pada tahun 2009 jumlah perusahaan kecil yang memiliki sertifikat mutu internasional atau perusahaan yang dapat melakukan ekspor hanya 1,6 %, sedangkan perusahaan menengah 6,3 %. Nilai tersebut berada jauh di bawah Filipina dan Vietnam. Pada tahun yang sama 8,6 % usaha kecil dan 18,6 % usaha menengah di Filipina memiliki sertifikat mutu internasional. Kepemilikan sertifikat mutu internasional di Vietnam untuk usaha kecil adalah 6 % dan usaha menengah 13,2 %. Dari data tersebut usaha kecil dan menengah Indonesia dalam mendukung ekspor masih sangat tertinggal, dalam

kategori ini Indonesia berada di peringkat dua terbawah atau satu tingkat di atas Myanmar dan tertinggal jauh dari Kamboja dan Laos.

a) Distorsi Perdagangan Pasca Ratifikasi Kebijakan Standardisasi Mutu

Distorsi pada sektor perdagangan dalam implementasi kebijakan standardisasi mutu produk ekspor muncul pada distorsi pasar. Kedudukan pasar yang terbentuk tidak lagi murni sebagai hubungan penawaran dan permintaan akan sebuah produk atau komoditas namun berada pada standar tertentu yang ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan rezim perdagangan internasional melalui lembaga ekonomi dunia (WTO). Pasar di negara maju tentu memiliki ketentuan standar yang lebih tinggi dari pasar di negara berkembang dan negara miskin. Adanya standar tertentu yang disepakati oleh rezim perdagangan internasional akan memaksa produsen atau negara eksportir berupaya mencapai titik standar internasional tersebut. Imbasnya adalah adanya kenaikan harga yang mengikuti peningkatan kualitas produk. Berikutnya muncul keterbatasan daya beli negara kecil dan sesama negara berkembang terhadap sebuah produk pada pasar internasional. Hal ini akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pasar internasional pada komoditas ekspor sehingga memunculkan distorsi perdagangan internasional.

Lebih lanjut dalam distribusi produk memungkinkan adanya penguasaan atas produk tertentu. Pada kepentingan negara industri maju, beberapa komoditas ekspor merupakan komoditas bahan mentah dan setengah jadi yang kemudian dikembangkan melalui proses industrialisasi di negara maju untuk menghasilkan produk yang lebih memiliki nilai jual. Sebagai contohnya, komoditas kapas dan benang yang dimpor oleh Amerika Serikat dari beberapa negara eksportir digunakan untuk industri fashion dan menghasilkan produk pakaian dengan nilai jual tinggi. Standar tertentu telah membuat produk yang beredar dipasar internasional dibatasi pada produk yang lolos kualifikasi ekspor, dengan nilai yang tinggi dan hanya dapat diperoleh oleh konsumen di negara maju yang memiliki kemampuan daya beli yang tinggi. Situasi inilah yang memungkinkan adanya monopoli pasar pada produk tertentu oleh negara industri maju.

Kondisi tidak efektif dalam perdagangan lainnya adalah dalam hal adanya pemisahan kualitas produk dan kategorisasi pasar. Kepentingan produsen adalah menjual produknya setinggi mungkin untuk mendapatkan selisih harga produksi dengan harga jual yang signifikan sehingga keuntungan produsen terus bertambah. Oleh sebab itu untuk menjawab standar pasar internasional dalam ekspor, produsen akan melakukan klasifikasi dengan mendistribusikan produk dengan kualitas yang memenuhi standar pada pasar internasional dan mendistribusikan produk dengan kualitas dan standar harga yang lebih rendah pada pasar dalam negeri. Kondisi ini pada akhirnya memisahkan produsen eksportir dengan produsen domestik di sebuah negara dalam kesenjangan lebih lebar yang dipisahkan oleh kategorisasi pasar. Produsen dengan tingkat modal terbatas dan tingkat penggunaan teknologi yang rendah diposisikan pada kegiatan produksi untuk pasar domestik, sebaliknya produsen dengan tingkat modal tinggi dan telah memanfaatkan teknologi industri diposisikan pada kegiatan produksi untuk pasar internasional. Saat sekarang ini perusahaan perikanan bermodal dalam negeri hanya menargetkan pasar domestik saja karena produk yang dihasilkan tidak mampu memenuhi standar.

Distorsi perdagangan akibat standarisasi juga nampak pada penurunan volume ekspor dan menghambat dibuka komoditas lainnya untuk mampu menembus pasar ekspor. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada volume produk yang laku di pasar internasional. Kondisi ketahanan ekspor Indonesia saat ini dinilai masih sangat potensial, namun yang harus diperhatikan kemampuan ekspor hanya dimiliki oleh perusahaan besar yang merupakan perusahaan bermodal asing dan bahkan didominasi oleh MNC yang kepemilikannya mutlak sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha dari luar negeri. Sumber daya alam yang berlimpah tidak mampu menutup permintaan pasar akibat dari ketidakmampuan produsen domestik dalam mempertahankan kualitas produk ekspor. Contoh, penolakan produk udang beku dari Indonesia ke pasar Uni Eropa yang disebabkan oleh temuan zat-zat berbahaya bagi manusia akibat dari penggunaan bahan kimia dalam proses penangkapan udang di Indonesia.

Gambar 5. Fluktuasi nilai ekspor Hasil perikanan 2008-2014



Sumber: Trias Melia, 2014 Potensi Dan Tantangan UKM Sektor Perikanan, Jurnal Tinjauan Ekonomi & Keuangan (TIK), volume IV nomor 8 edisi Agustus 2014

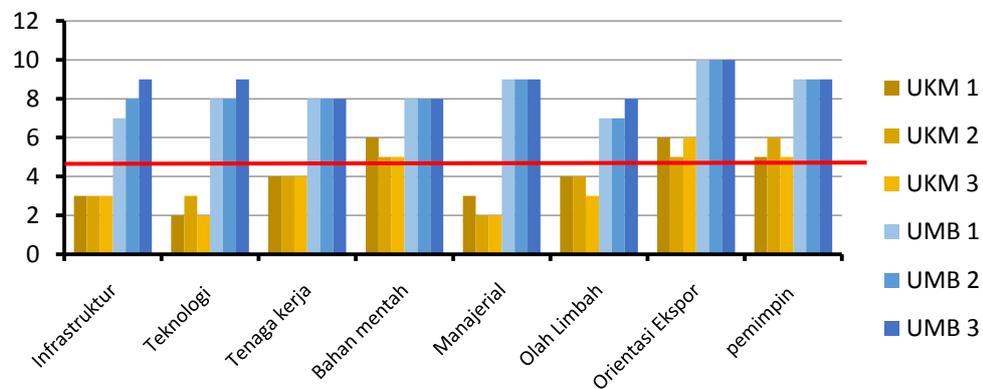
Untuk memperdalam kajian, peneliti melakukan observasi dan penelitian lebih mendetail dengan mendatangi Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan distribusi ekspor non migas yang cukup tinggi bagi Indonesia karena sumber daya laut yang potensial sebagai daerah dipesisir pantai utara Jawa. Kondisi yang terjadi di level daerah jelas menunjukkan ketidakmampuan perusahaan kecil dan menengah dalam mengikuti standarisasi yang diminta oleh pasar Internasional. Peneliti mengamati bahwa perusahaan kecil dan menengah masih banyak menggunakan alat produksi sederhana dan dilakukan oleh tenaga kerja dengan keahlian yang rendah dalam proses produksinya sehingga menghasilkan kualitas produk yang tidak mampu memenuhi standar internasional.

Ekspor hasil perikanan Kabupaten Pati yang potensial dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren yang menurun. Standardisasi mutu oleh pasar internasional disebut sebagai salah satu alasan penyebab menurunnya angka ekspor produk perikanan Kabupaten Pati. Fakta lainnya adalah hanya terdapat satu perusahaan perikanan di Pati yang mampu melakukan ekspor yaitu PT. Misaja Mitra, perusahaan ini merupakan perusahaan besar berbasis modal asing.

Infrastruktur menjadi sorotan dalam hal menganalisis ketidakmampuan perusahaan kecil untuk berperan dalam ekspor. Sebagai salah satu mata

pencapaian utama warga Pati, sektor perikanan banyak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan kelautan. Namun ironisnya pada saat sekarang banyak pengusaha local yang justru gulung tikar karena tidak mampu mengikuti standar pasar. Pengusaha yang masih bertahan pun hanya mampu merealisasikan produknya bagi pasar dalam negeri. Mengacu pada penjelasan *World Economic Forum* mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya daya saing industri UKM melalui metode observasi lapangan dapat dilaporkan kondisi aktifitas pada perusahaan eksportir di Pati sebagai berikut:

Gambar 6. Kondisi Infrastruktur perusahaan di Kabupaten Pati



Sumber: Observasi peneliti pada 3 perusahaan UKM dan 3 perusahaan eksportir besar di Kabupaten Pati, pada tanggal 18-22 Oktober 2016 (data diolah)

Dari data diatas terlihat jelas kesenjangan kondisi infrastruktur pada perusahaan UKM dibandingkan dengan perusahaan besar yang ada di Kabupaten Pati. Hal inilah kemudian yang menjadi alasan mengapa ekspor Kabupaten Pati hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Perusahaan UKM hanya bergerak sebagai penyedia bahan mentah dan sumber daya lainnya bagi kebutuhan ekspor perusahaan besar.

Keseluruhan hal diatas menunjukkan bahwa standardisasi telah mengklasifikasi produk dan membatasi pasar dalam aktifitas perdagangan internasional khususnya ekspor di negara berkembang seperti Indonesia. Distorsi pada sektor produksi yang dialami perusahaan kecil dan menengah akibat dari kebijakan standardisasi mempengaruhi performa perusahaan tersebut dalam kontribusi ekspor di Indonesia.

b) Distorsi Ekonomi Domestik Akibat Kegagalan Alokasi Modal

Hukum persaingan memang pada dasarnya mengharuskan pelaku usaha untuk dapat bersaing secara sehat. Namun perlu diingat juga bahwa penciptaan demokrasi ekonomi melalui persaingan yang sehat memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan pelaku usaha, baik itu besar maupun kecil. Oleh karena itu perlu ada mekanisme perlindungan bagi pelaku usaha kecil ketika harus berhadapan dengan pelaku usaha dengan modal yang besar agar tetap tercipta posisi tawar yang seimbang. Hukum persaingan juga tetap harus menjunjung tinggi kepentingan umum dan kepentingan nasional.

Selanjutnya, keterbatasan sumber daya yang dialami oleh negara berkembang dan negara tertinggal dalam upaya mempertahankan daya saing dengan memenuhi standar pasar internasional telah menimbulkan ketergantungan pada negara maju. Dalam kapitalisme, peran modal memegang peranan yang sangat penting, sehingga tidaklah mengherankan jika negara-negara berkembang berlomba-lomba membuka diri bagi masuknya investor asing dan perusahaan multinasional. Masuknya banyak investor asing dan perusahaan multinasional (MNCs) tidak dipungkiri keberadaannya memang dibutuhkan oleh negara berkembang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya aktifitas ekspor. Konsekuensinya yang muncul adalah dibutuhkan tata kelola distribusi modal yang tepat dari pemerintah. Pemerintah Indonesia harus mampu mengarahkan modal kepada sektor-sektor ekonomi kerakyatan untuk menghidupkan perekonomian di level bawah. Distribusi sumber daya modal sampai saat ini masih menjadi masalah klasik di Indonesia. Pemangkasan birokratisasi hanya sampai proses meloloskan modal dari investor namun kemudian birokrasi yang berbelit masih terjadi dalam distribusi modal.

Ketergantungan pembangunan Indonesia pada modal asing yang telah berlangsung lama juga telah difasilitasi dengan regulasi penanaman modal asing. Perusahaan penanaman modal asing agar dapat diberikan perlakuan yang sama dengan penanaman modal dalam negeri, harus memenuhi persyaratan: minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional, atau minimal 45% sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional dengan syarat 20% dari

jumlah seluruh saham dijual melalui pasar modal sebagai saham atas nama. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk merespon peraturan tentang investasi kepemilikan saham dan untuk meningkatkan ekspor non migas serta merangsang investasi.¹⁰

Keberadaan modal dalam peningkatan standar mutu nasional dialokasikan pada proses alih teknologi industri dengan mengembangkan mesin produksi yang tradisional menjadi mesin produksi yang lebih modern. Penggunaan teknologi dalam industri akan menghasilkan produk yang lebih memiliki nilai tawar yang tinggi, terjaga kontinuitas mutunya, dan efektif dalam memenuhi volume permintaan, serta efisien dalam distribusi ekspor. Masuknya modal membuka kesempatan-kesempatan bagi pengusaha domestik untuk meningkatkan keuntungan ekonominya. Namun pada kenyataannya tambahan modal dari investor justru lebih dinikmati oleh segelintir pelaku usaha yang memiliki sumber daya finansial. Teori investasi menyebutkan bahwa investor akan memilih rekan kerja sama pada perusahaan atau pelaku usaha yang dapat memberikan jaminan prinsip-prinsip investasi seperti, jaminan hukum, akuntabilitas, transparansi dan tentu adanya jaminan kontinuitas kerjasama. Maka tidaklah mengherankan jika kerja sama investasi kecil intensitasnya dilakukan oleh investor kepada perusahaan kecil dan menengah di Indonesia.

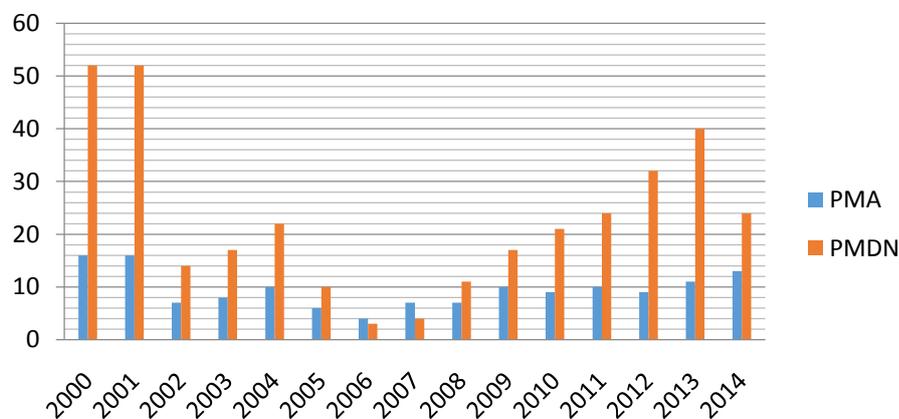
Hal diatas semakin diperparah oleh situasi banyaknya legislator yang berwenang membuka pintu investasi juga merupakan pengusaha yang masih aktif menjalankan bisnisnya. Pada prakteknya alokasi sumber daya tersebut tidak dapat serta merta efisien dengan sendirinya. Selain regulator, dalam hal ini pemerintah, ada pelaku ekonomi tertentu yang dimungkinkan mendapatkan manfaat efisiensi yang lebih besar dari yang seharusnya. Situasi semacam inilah yang terjadi di Indonesia, seolah sudah menjadi identitas yang melekat, tingginya tingkat korupsi memungkinkan adanya jalan pintas bagi pelaku bisnis asing untuk menggunakan cara-cara illegal dalam proses kesepakatan ekonomi.

Kegagalan distribusi modal untuk membangun infrastruktur mutu produk ekspor dapat berdampak pada matinya industri kecil dan menengah milik rakyat

¹⁰ Yozua Makes, "*Divestasi pada Perusahaan PMA: Beberapa Masalah*", Newsletter, No.13/IV/Jun1993

akibat tidak mampu mengatasi kebutuhan peningkatan infrastruktur untuk menjawab tantangan standar pasar internasional. Contoh konkritnya seperti yang terjadi pada industri udang beku di Kabupaten Pati, dimana perusahaan udang milik warga hanya dapat mengambil peran sebagai penyedia udang akibat tidak mampu mengolah atau menyajikan produk udang yang layak ekspor. Penelitian lapangan atau observasi yang dilakukan peneliti ditambah dengan wawancara kepada pelaku usaha dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa perusahaan kecil dan menengah penghasil udang tidak mampu bertahan karena kalah bersaing dengan perusahaan penghasil produk serupa yang dikelola dengan baik. Munculnya PT. Misaja Mitra sebagai perusahaan eksportir produk udang beku yang sumber modalnya berasal dari modal asing pada akhirnya menguasai proses produksi udang beku ekspor di Kabupaten Pati. Matinya sektor-sektor produksi pada industri kerakyatan akan menurunkan rasio pemerataan kesejahteraan.

Gambar 7.Fluktuasi Jumlah Perusahaan Penangkapan Ikan Menurut Status modal, 2000-2014



Sumber: BPS, 2015

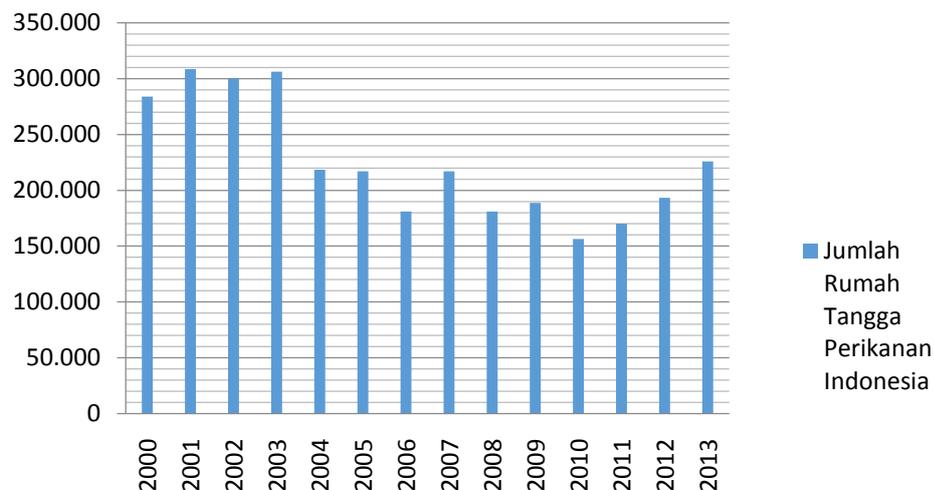
Dari data diatas dapat kita lihat kondisi fluktuasi yang sangat signifikan pada jumlah perusahaan perikanan bermodal dalam negeri (PMDN) dibandingkan dengan perusahaan perikanan bermodal asing (PMA) yang lebih stabil jumlahnya. Hal ini berarti bahwa kemampuan perusahaan bermodal dalam negeri cenderung mengalami kesulitan dalam mempertahankan usahanya. Kondisi ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan terdapat penyebab yang

mempengaruhinya. Salah satu diantaranya adalah pendapatan keuntungan yang tidak stabil akibat dari lemahnya daya saing produk yang dihasilkan.

c) Distorsi Sosiopolitik Akibat Standardisasi yang Dipaksakan

Sebagai negara berkembang perekonomian Indonesia diperkuat oleh industri-industri milik rakyat dalam bentuk usaha kecil dan menengah yang telah berlangsung cukup lama dan sifat turun menurun hingga saat ini. Standardisasi menjadi ancaman bagi industri kecil dan menengah dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Industri kecil dan menengah banyak melibatkan potensi masyarakat dari segala macam latar belakang ekonomi dan pendidikan. Hal ini berarti keberadaan industri kecil dan menengah sangat diperlukan oleh masyarakat di Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sampai pada level pedesaan. Data dibawah ini menunjukkan adanya fluktuasi dan kecenderungan menurun dalam hal jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Indonesia sejak tahun diratifikasinya kebijakan standardisasi mutu produk ekspor. Hal ini mengandung arti bahwa sektor perikanan mulai ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, sebabnya adalah sektor perikanan ini mulai dianggap tidak memberikan jaminan kesejahteraan hari depan akibat sulit bertahan dan berkompetisi dengan sumber daya yang tidak kunjung meningkat dari keterbatasan.

Gambar 8. Fluktuasi Jumlah Rumah Tangga Perikanan Indonesia 2000-2013



Sumber: BPS, 2015

Beberapa distorsi sosiopolitik yang muncul akibat diberlakukannya standardisasi di Indonesia diantaranya *pertama*, kondisi dimana perusahaan eksportir besar terus mampu melakukan proses produksi secara efektif menjawab permintaan pasar internasional dan kondisi dimana perusahaan UKM yang masih belum mampu menjawab kebutuhan modal untuk meningkatkan infrastruktur sehingga kesulitan melebarkan pasar ke luar negeri yang saat ini tengah berlangsung dalam aktifitas ekspor Indonesia menyebabkan perbedaan rasio keuntungan yang tidak berimbang diantara kedua jenis perusahaan. Program-program bantuan modal usaha yang disediakan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) nilai tidak mampu untuk dialokasikan kepada alih teknologi pada industri kecil dan menengah di banyak daerah di Indonesia.

Belum lagi ditambah dengan asumsi birokrasi berbelit oleh masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintah yang membuat program bantuan ini tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Kekalahan daya saing akan mematikan distribusi produk yang dihasilkan oleh perusahaan UKM, produk yang tidak dapat dipasarkan tidak mampu mengganti biaya produksi yang dikeluarkan. Jika dibiarkan secara berlarut hal ini akan dapat mematikan industri kecil dan menengah yang selama ini disebut sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan atau setidaknya akan semakin melebarkan kesenjangan ekonomi diantara pelaku usaha di Indonesia.

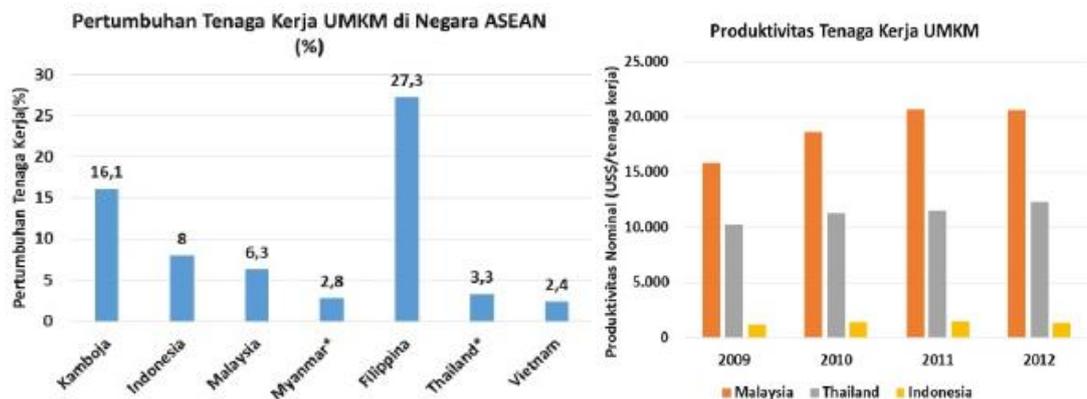
Kedua, munculnya seleksi dunia kerja yang secara perlahan akan memisahkan sumber daya tenaga kerja berkualitas rendah dengan tenaga kerja ahli atau berlatar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Standardisasi dalam manajemen perusahaan memberi penilaian atas kriteria ini. Munculnya keraguan dalam masyarakat, terutama bagi generasi penerus untuk memilih industri sebagai jenis pekerjaan yang akan digeluti dimasa yang akan datang. Keterpihakan pemerintah pada perusahaan besar daripada perusahaan kecil dan menengah yang dinilai tidak memberi jaminan masa depan pada industri kerakyatan perlahan ditinggalkan oleh generasi penerus.

Kemungkinan ini sangat mungkin terjadi jika menilik pada data SME landscape pada Asia SME Finance Monitor 2014 yang dikeluarkan oleh Asian

Development Bank (ADB), pertumbuhan tenaga kerja Indonesia masih berada di bawah Kamboja pada tahun 2014. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja UKM di Kamboja sebesar 16,1 %, sedangkan Indonesia hanya sebesar 8 %. Sementara itu, untuk negara ASEAN lainnya, pada tahun 2012 pertumbuhan penyerapan tenaga kerja UKM adalah 27,3 % untuk Filipina, 6,3 % untuk Malaysia, dan 2,4 % untuk Vietnam. Data yang tersedia untuk Thailand adalah data tahun 2013 yang pertumbuhan penyerapan tenaga kerja UKM-nya mencapai 3,3 %. Dalam hal produktivitas, produktivitas tenaga kerja UKM di Indonesia jauh di bawah produktivitas Thailand dan Malaysia.

Pada tahun 2012 produktivitas UKM di Indonesia hanya \$1.355, sedangkan UKM Malaysia mencapai \$20.609 dan Thailand \$12,263. Rata-rata pertumbuhan produktivitas tahun 2009–2012 untuk Indonesia, Thailand, dan Malaysia berturut-turut adalah sebesar 4,9 %, 6,1 %, dan 9,5 %. Situasi ketidakmampuan industri kecil dan menengah dalam menyerap tenaga kerja dan tidak mampu mendatangkan produktivitas bagi perekonomian masyarakat lambat laun akan membuat keberlangsungan usaha kecil dan menengah di Indonesia terancam

Gambar 9. Pertumbuhan dan Produktivitas Tenaga Kerja UKM Indonesia



Sumber: *Asia SME Finacial Monitor 2014*, *ADS*, dan *Kementerian KUKM (www.dekop.go.id)*, diolah

Rangkaian terakhir dari teori dependensi mengkaji kausalitas dari adanya distorsi sosiopolitik, yaitu munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Minimnya bantuan modal yang mutlak dibutuhkan untuk menjawab tantangan standarisasi oleh pemerintah pada industri kecil dan menengah dinilai sebagai

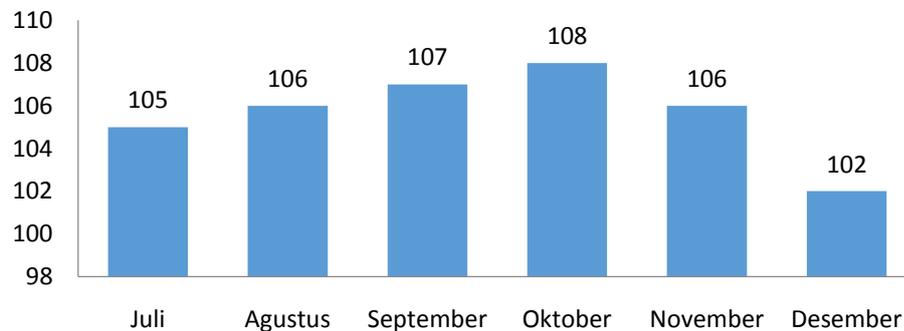
ketidakberpihakan pemerintah pada ekonomi rakyat dan hanya mementingkan perusahaan besar dan pemilik modal. Penilaian ini lambat laun akan terakumulasi dan menjadi akselerator timbulnya konflik politik akibat legitimasi masyarakat ekonomi kecil dan menengah kepada pemerintah yang menurun karena dinilai tidak mampu mengangkat perekonomian rakyat secara merata.

Diawali dari kegagalan pemerintah menciptakan regulasi dan sistem ekonomi berbasis kerakyatan maka akan muncul kesenjangan atau ketimpangan tingkat kesejahteraan warga. Menurut World Bank, dalam laporan penelitiannya pada November 2015, penilaian kesenjangan warga negara Indonesia sudah sangat nyata terjadi. Responden memperkirakan bahwa saat ini, seperlima warga terkaya Indonesia mengonsumsi 38 % dari total konsumsi. Meskipun kebanyakan responden sudah menyadari bahwa Indonesia terlalu timpang, data nasional menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan justru jauh lebih tinggi dari persepsi mereka, seperlima warga terkaya Indonesia mengonsumsi 49 % dari total konsumsi.¹¹

Khusus pada perikanan, kesenjangan kesejahteraan disebabkan oleh nilai tukar nelayan atas produk perikanan yang dihasilkan. Besarnya biaya operasional tidak diikuti dengan peningkatan nilai tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan oleh nelayan tradisional yang sepenuhnya mengandalkan sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ironisnya, permintaan pasar internasional terhadap produk perikanan dari Indonesia ternyata tetap mampu terpenuhi. Kondisi kesejahteraan nelayan yang justru menurun ditengah terjawabnya permintaan pasar internasional akan produk perikanan Indonesia melahirkan pertanyaan siapa aktor yang mendominasi ekspor Indonesia.

¹¹Bank Dunia, *Ketimpangan yang Semakin Lebar*, November 2015, jurnal The World Bank and Australian Aid, Jakarta: Kantor Bank Dunia, diunduh dari <http://pubdocs.worldbank.org>, diakses pada 01 Januari 2017

Gambar 10. Nilai Tukar nelayan Juli-Desember 2015



Sumber: BPS, 2015 (diolah)

Dari situasi ini jelas terjadi distorsi dalam sistem sosial, dimana keterbatasan sumber daya telah mendesak masyarakat nelayan dari lahan pekerjaannya yang telah berlangsung turun-menurun. Munculnya perusahaan perikanan modal asing telah membuat nelayan lokal tidak mampu bersaing dan pada akhirnya tidak hanya kesenjangan kesejahteraan yang semakin melebar namun juga lambat laun akan disingkirkan oleh perusahaan modal asing.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama 15 tahun di Indonesia telah membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan kelas menengah yang berkembang. Namun, pertumbuhan selama satu dasawarsa terakhir hanya menguntungkan 20% (%) warga terkaya, sementara 80% (%) populasi sisanyateringgal di belakang. Meningkatnya kesenjangan standar hidup dan semakin terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang, menyebabkan tingkat ketimpangan Indonesia relatif tinggi dan naik lebih cepat daripada sebagian besar negara tetangga. Ketimpangan dalam taraf tertentu dapat menjadi hal positif, karena mereka yang bekerja keras, berinovasi dan mengambil risiko mendapat imbalan atas usahanya. Namun, ketimpangan pendapatan menjadi tidak adil ketika tidak semua orang memiliki peluang awal yang sama.¹²

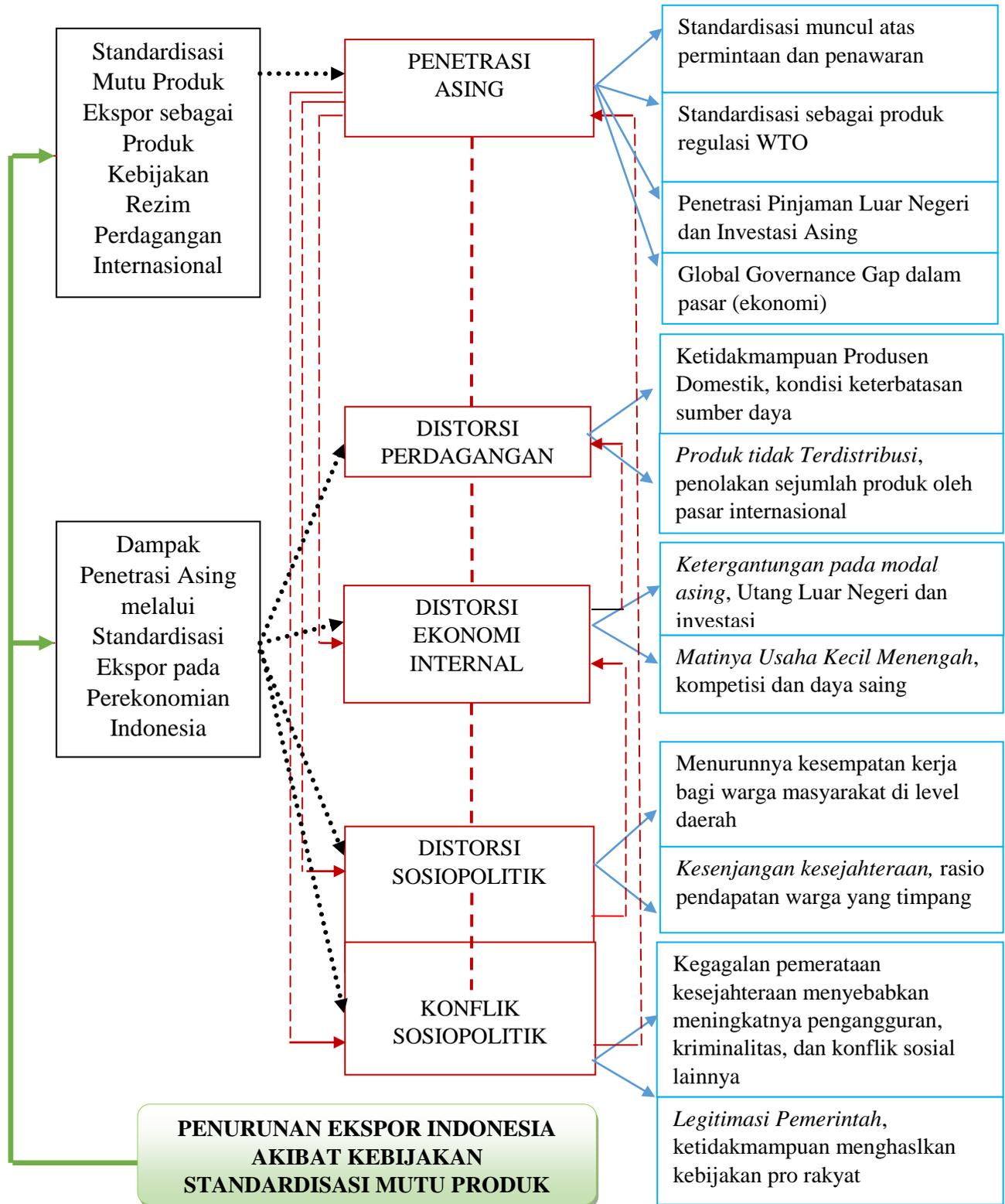
Ketika masyarakat menyadari adanya jurang pendapatan dan kekayaan, maka potensi ketegangan sosial dan ketidakrukunan sangat mungkin terjadi sehingga dapat menimbulkan konflik. Memang terbukti bahwa daerah-daerah dengan tingkat ketimpangan lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia memiliki

¹²Ibid

rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat ketimpangan lebih rendah. Masyarakat Indonesia sudah menyadari adanya ketimpangan yang terlalu tinggi dan harus dikurangi. Ketimpangan yang tidak ditanggapi dan dibiarkan berkembang dapat menimbulkan akibat serius, yakni pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang lebih lambat serta peningkatan risiko konflik. Kebanyakan warga Indonesia kini menyadari isu ini dan meyakini bahwa Pemerintah harus mengambil tindakan menyelesaikan kesenjangan yang makin lebar tersebut dengan strategi ekonomi yang tepat.

Masalah Kemiskinan dan kejahatan memiliki hubungan kausalitas duamasalah sosial yang sulit untuk dipecahkan. Kondisi kemiskinan menyebabkan timbulnya kejahatan seperti pencurian, yang sangat erat kaitannya dengan tidak adanya keserasian antara kehidupan seseorang dengan lingkungan sosial (keluarga dan masyarakat) seperti salah satunya adanya kesenjangan sosial yang lebar. Jika hal ini terus menerus terjadi maka pertaruhannya adalah legitimasi politik. Jika politik suatu negara memiliki tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang rendah maka dapat dipastikan akan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Gambar 11. Analisis Standardisasi dengan Teori Ketergantungan



E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan dengan mengacu pada hipotesa yang peneliti tentukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut: *pertama*, Kausalitas kebijakan berupa pengaruh variable standardisasi terhadap variable daya saing serta pengaruhnya pada kesejahteraan ekonomi rakyat adalah sifat teoritis yang menjadi dasar penerapan kebijakan standardisasi ini. Akan tetapi adalah benar bahwa hal ini terlalu prematur atau terlalu dini jika indikatornya melihat pada kemampuan perusahaan kecil dan menengah dengan kondisi infrastruktur yang rendah untuk mengikuti standar pasar internasional. Sebuah kebijakan semestinya tidak hanya kuat dalam melahirkan aturan perundang-undangan, sekalipun ini juga sangat penting, namun juga harus mengukur kemampuan masyarakat sebagai pihak yang berdampak langsung atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun yang terjadi kebijakan standardisasi mutu produk ekspor di Indonesia terkesan hanya memfasilitasi kebutuhan pasar internasional namun tidak diikuti dengan pendampingan dan pemberian bantuan yang nyata bagi pelaku usaha untuk dapat ikut merasakan manfaat yang didapat dari kebijakan tersebut.

Analisis dengan pendekatan konstruktivisme cukup memberi pengampunan bagi pemerintah Indonesia atas langkahnya yang dianggap terlalu dini dalam meratifikasi kebijakan standardisasi mutu produk ekspor. Dunia internasional saat ini seolah sedang dibangun menuju ukuran atau standar norma tertentu di segala sektor, utamanya disektor politik dan ekonomi, yang didorong kepada seluruh aktor internasional, baik aktor negara (*public*) maupun aktor swasta (*private*). Situasi ini yang kemudian tidak bisa dihindari oleh pemerintah Indonesia sehingga dengan modal keyakinan dan strategi-strategi ekonomi yang sebenarnya disandarkan pada peran serta aktor ekonomi asing maka pemerintah Indonesia dengan yakin menyepakati kebijakan ekspor tersebut.

Kondisi berikutnya yang muncul akibat kebijakan standardisasi yang seolah dipaksakan untuk diintegrasikan dalam sistem standar nasional, terutama dalam aktifitas ekspor adalah munculnya ketergantungan kepada negara industri maju. Dua

klasifikasi ketergantungan yang muncul secara nyata adalah: Pertama, *ketergantungan industri keuangan*, ditandai dengan adanya suatu dominasi modal besar di negara maju yang ekspansinya ke negara berkembang dan negara miskin dilakukan dengan investasi dalam produksi bahan mentah primer untuk tujuan konsumsi di negara tujuan investasi modal. Struktur produksi di negara berkembang tumbuh untuk melayani ekspor komoditi sehingga terjadilah apa yang disebut oleh masyarakat Amerika Latin "*desarollo hacia afuera*" atau pembangunan yang berorientasi ke luar negeri. Ekonomi dalam negeri tidak mampu menciptakan pasar atau landasan permintaan efektif yang kokoh untuk menopang pembangunan industri dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu: 1) Sebagian besar pendapatan nasional yang diperoleh melalui ekspor digunakan untuk membeli input dari luar negeri, dikirimkan ke luar negeri sebagai keuntungan dan digunakan untuk mengimpor barang konsumsi mewah sehingga yang tinggal untuk reinvestasi relatif sangat kecil, 2) Kaum pekerja berada dalam proses super-eksploitatif sehingga konsumsi mereka relatif terbatas dan tidak dapat menimbulkan permintaan efektif yang berarti. Situasi ini menimbulkan ketergantungan perdagangan internasional negara berkembang pada modal asing karena modal domestik tidak mampu menjawab kebutuhan industrialisasi dengan sendirinya. Begitu pula ketika standarisasi mutu produk ekspor diratifikasi dalam kondisi infrastruktur industri di Indonesia yang masih rendah semakin membuka peluang bagi masuknya modal asing yang diarahkan untuk menutupi keteringgalan infrastruktur industri. Dari sini maka dapat dibaca prioritas diratifikasinya kebijakan internasional oleh pemerintah Indonesia cenderung lebih ditujukan untuk membuka investasi dan modal asing daripada membangun perekonomian berbasis kerakyatan. Kedua, *ketergantungan teknologi industri*, yaitu konsekuensi dari operasi perusahaan multinasional yang mulai melakukan investasi di sektor industri di negara berkembang. Hampir seluruh industri baru di negara berkembang secara teknis produksinya tergantung pada luar negeri. Investasi baru di negara berkembang seluruhnya ditentukan oleh tersedianya devisa untuk membiayai mesin dan bahan mentah yang tidak diproses di dalam negeri. Pembelian mesin dan input lain yang diperlukan dari luar negeri oleh pihak di negara berkembang dibatasi oleh dua faktor, yaitu kemampuan sektor ekspor yang

ada untuk menghasilkan devisa dan sistem monopoli hak paten yang selalu mengakibatkan produsen mesin atau afiliasinya cenderung untuk mengalihkan mesin tersebut sebagai penyertaan modal merek dalam proyek investasi di negara berkembang dan selalu tidak bersedia menjual mesin sebagai komoditi biasa. Jika produksi di sektor ekspor dikuasai oleh pihak asing, maka di sini kembali timbul ketergantungan yang pada hakekatnya merupakan ketergantungan kolonial dalam bentuk baru dengan segala akibatnya di bidang ekonomi dan sosial politik.

Ketergantungan pada dua aspek diatas membuat banyak perusahaan kecil dan menengah yang gulung tikar karena tidak mendapatkan akses modal yang disediakan. Kebutuhan modal dan alih teknologi belum mampu dijawab oleh pemerintah Indonesia sehingga yang terjadi adalah ketertinggalan tingkat kontribusi perusahaan kecil dan menengah dalam ekspor. Kontribusi ekspor UKM Indonesia hanya 9,3 %, kontras dengan UKM Thailand, Filipina, dan Malaysia yang mampu berkontribusi diatas 28,1 % terhadap total ekspor. Bahkan kontribusi UKM Indonesia terhadap total ekspor masih tertinggal dibawah UKM Vietnam dengan kontribusi sebesar 16,8 %

Kedua, disadari oleh pemerintah bahwa standardisasi hanya bisa diikuti oleh perusahaan besar. Terdapat kesan bahwa pemerintah sudah cukup puas dengan aktifitas ekspor Indonesia yang didominasi oleh perusahaan besar yang memiliki modal finansial memadai sehingga mampu menyediakan infrastruktur yang lebih modern dan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi. Hal ini sebenarnya dapat dipahami jika melihat pada keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk mendukung dan mengangkat perusahaan kecil dan menengah untuk dapat terlibat lebih dalam pada aktifitas ekspor di Indonesia.

Rezim perdagangan Internasional membuat negara-negara berkembang terkoneksi dengan sistem ekonomi dunia yang kapitalis dan liberal, sehingga mereka menjadi negara-negara pinggiran dari negara-negara kapitalis. Liberalisme hanya akan menyebabkan terbentuknya dua jenis negara yaitu negara pusat dan negara pinggiran seperti mengaju pada istilah pada teori ketergantungan. Barang-barang industri dihasilkan oleh negara pusat, sedangkan hasil-hasil perikanan (dan pertanian) dihasilkan oleh negara pinggiran. Keduanya melakukan transaksi

perdagangan yang seharusnya mencapai keuntungan dikedua belah pihak, namun dalam prakteknya keuntungan itu hanya dinikmati oleh negara maju. Dengan melakukan ekspor barang-barang ke negara pusat, maka pendapatan negara pinggiran semakin meningkat dan berakibat pada peningkatan pendapatan rakyat dinegara pinggiran. Selanjutnya dengan meningkatnya pendapatan, maka kebutuhan akan barang-barang mewah dari negara industri juga mengalami peningkatan, sehingga impor barang mewah di negara pinggiran meningkat. Peningkatan nilai tukar barang-barang primer dengan hasil komoditi perikanan dan pertanian, menyebabkan tidak berimbangnya neraca perdagangan dan menjadikanya defisit.

Negara industri juga sering melakukan proteksi atas komoditi yang mereka hasilkan, sehingga negara pinggiran sulit mengekspor hasil produksinya ke negara pusat. Penemuan teknologi baru juga mendorong sintesis bahan mentah industri, sehingga negara pusat tidak perlu mengimpor bahan bakar mentah dari negara pinggiran. Hal ini menyebabkan gerak ekonomi negara pinggiran menjadi terhenti. Disamping itu Negara pinggiran juga seolah dipaksa untuk menjadi negara penerima donor agar mampu menjawab tuntutan standar pasar internasional. Kewajiban membayar utang luar negeri dan perjuangan mengurangi kesenjangan standar proses produksi komoditas ekspor ikut menambah pengeluaran neraca pembayaran. Inilah yang menimbulkan struktur ketergantungan yang menjadi penghambat utama bagi perkembangan pembangunan ekonomi di negara-negara pinggiran atau negara berkembang.

Dalam posisinya sebagai negara pinggiran¹³, pelaku usaha atau produsen ekspor pada industri kecil dan menengah di Indonesia mengalami kondisi ketidakefektifan (distorsi) akibat berupaya mengikuti standar pasar internasional yang tinggi dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Kemampuan pemerintah melakukan alih teknologi yang kembali lagi terkendala modal membuat minim peranannya dalam membantu industri kerakyatan menjawab tantangan standardisasi ekspor. Kompleksitas ini membuat kontribusi industri kerakyatan relatif masih

¹³istilah ini merujuk pada teori Dependency pada Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta; LP3ES

rendah dan tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Keseluruhan hal inilah yang menjadi penghambat peningkatan volume hasil perikanan Indonesia.

2. Saran

Dari penelitian ini dapat peneliti sampaikan beberapa saran yang membangun bagi pelaksanaan ekspor di Indonesia dalam menghadapi tantangan standardisasi mutu produk ekspor pasar internasional, yaitu sebagai berikut:

- a) Tantangan oleh rezim perdagangan internasional harus dijawab oleh pemerintah dengan strategi yang sistematis dan melalui pertimbangan yang matang sebelum melakukan ratifikasi kebijakan internasional
- b) Kontribusi ekspor oleh UKM di Indonesia yang masih tertinggal dengan negara Asia Tenggara lainnya harus mampu dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengedepankan UKM sebagai tiang penyangga perekonomian Indonesia dengan alokasi modal Negara dan modal asing yang tepat sasaran pada peningkatan kualitas produksi oleh UKM.
- c) Kemampuan daya saing dalam menghadapi perdagangan internasional yang sejauh ini dicapai oleh Indonesia adalah didominasi oleh perusahaan besar yang berbasis investasi asing. Kondisi ini harus disadari oleh pemerintah Indonesia dan disikapi dengan regulasi ekonomi yang mendorong industri kerakyatan.
- d) Prioritas pada alih teknologi akan mempercepat pencapaian produk Indonesia pada standar pasar internasional
- e) Mengurangi ketergantungan utang luar negeri (ULN) dalam menggerakkan perekonomian domestic
- f) *Global Governance Gaps* dalam regulasi ekonomi harus dikelola dan disikapi dengan strategi yang mengedepankan kepentingan rakyat daripada bergantung pada aktor asing

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia, *Ketimpangan yang Semakin Lebar*, November 2015, jurnal The World Bank and Australian Aid, Jakarta: Kantor Bank Dunia, diunduh dari <http://pubdocs.worldbank.org>, diakses pada 01 Januari 2017
- Blomstrom dan Hettne. 1984, *Development Theory in Transition, The Dependency Debate and Beyond: Third World Response*, London : Routledge, hal 17
- Edelman, Marc and Angelique Hangerud.: 2006, *The Anthropology of Development and Globalization; From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism*. Blackwell Publishing, Malden MA USA, Victoria, Australia
- Edwards, Michael, 2007, *Civil Society: Polity Press in association with Blackwell Publishing Ltd*, Malden, MA 02148, USA
- <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>, diunduh pada 28 Desember 2016
- Kementerian Keuangan RI, *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*, Volume VII Januari 2016, Jakarta: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Pres
- Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta; LP3ES;1990, hal. 204
- Sutiarnoto MS, 2001, *Tantangan dan Peluang Investasi Asing*, Jurnal Hukum, Vol 6 No. 3, Agustus, hal. 271
- Theotonio Dos Santos, 1970, *The Sctructure of Dependence*, American Economic Review, Vol 60 (2), h. 231
- Viviane, Manoppo, 2007, *Utang Luar Negeri Indonesia (Perspektif Ekonomi Politik)*, Journal of Indonesian Applied Economics Vol.1 No.1 Oktober 2007, 36-45, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado
- Wignaraja, G., Jinjark, Y, 2015, *Why do SMEs not borrow more from banks? Evidence from the People's Republic of China and Southeast Asia*. ADBI Working Paper 509.
- Yozua Makes, *"Divestasi pada Perusahaan PMA: Beberapa Masalah"*, Newsletter, No.13/IV/Jun1993